

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 190/A.4-II/V/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

28 Mai 2018

Kepada :
Yth. Pemda
Kabupaten Ngawi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Gangsar Nurmansyah
No. Mahasiswa : 20140610309
Alamat : Sidorejo Rt.02 RW.01 Gengneng Ngawi
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010
- 2030
Waktu : Mei s.d. Juli 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 190/A.4-II/V/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

28 Mai 2018

Kepada :
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Ngawi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Gangsar Nurmansyah
No. Mahasiswa : 20140610309
Alamat : Sidorejo Rt.02 RW.01 Gengneng Ngawi
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010
- 2030
Waktu : Mei s.d. Juli 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 190/A.4-II/V/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

28 Mai 2018

Kepada :
Yth. Biro Hukum
Kabupaten Ngawi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Gangsar Nurmansyah
No. Mahasiswa : 20140610309
Alamat : Sidorejo Rt.02 RW.01 Gengneng Ngawi
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010
- 2030
Waktu : Mei s.d. Juli 2018

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.
NIK. 19681023199303 153.015



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 28 Juni 2018

Nomor : 074/7092/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur

Di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
Nomor : 190/A.4-II/V/2018
Tanggal : 28 Juni 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010-2030"** kepada :

Nama : GANGSAR NURMANSYAH
NIM : 20140610309
No. HP/Identitas : 085655731915/3521050712950002
Prodi/Departemen : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 01 Juli 2018 s.d. 30 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

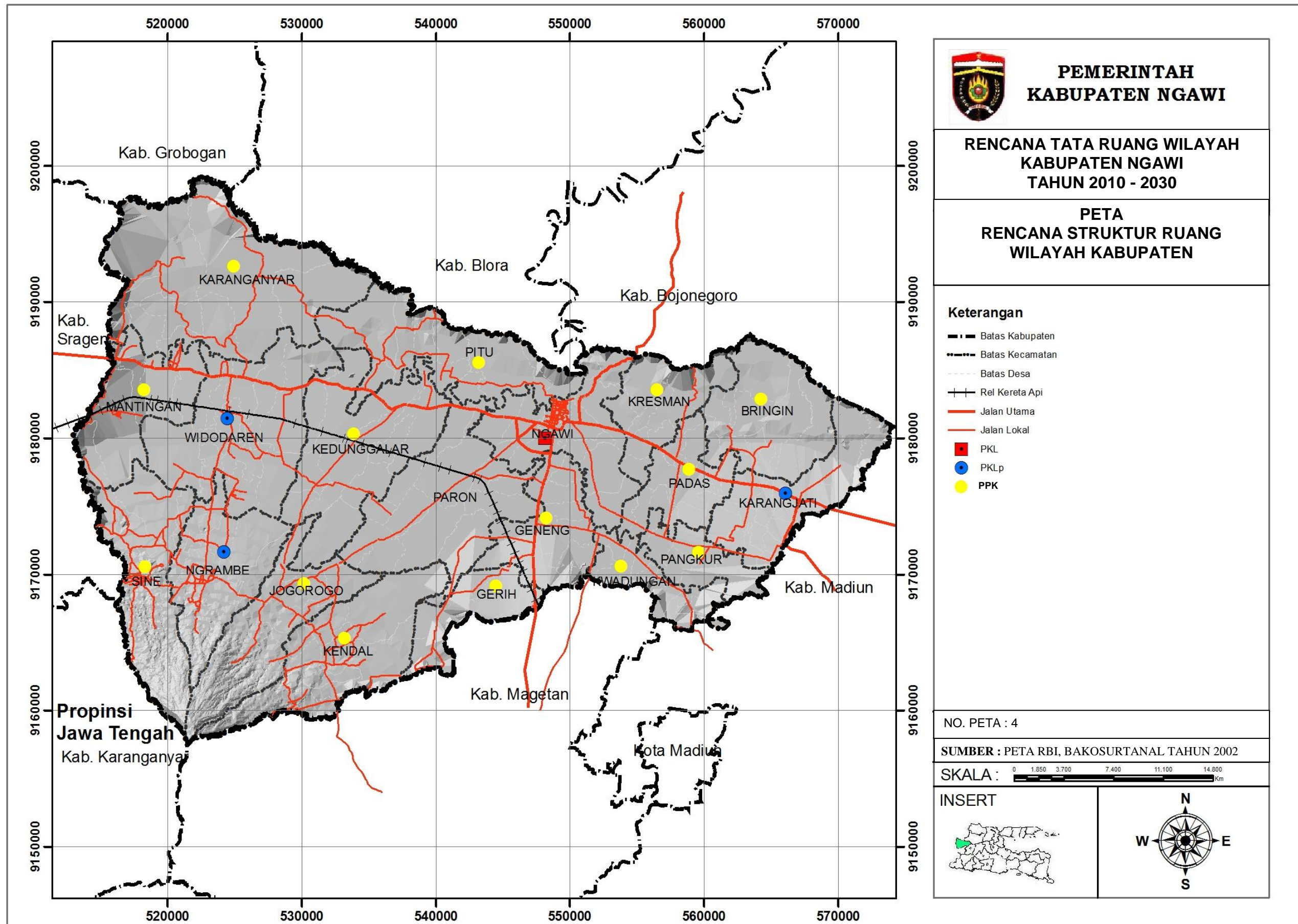
Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

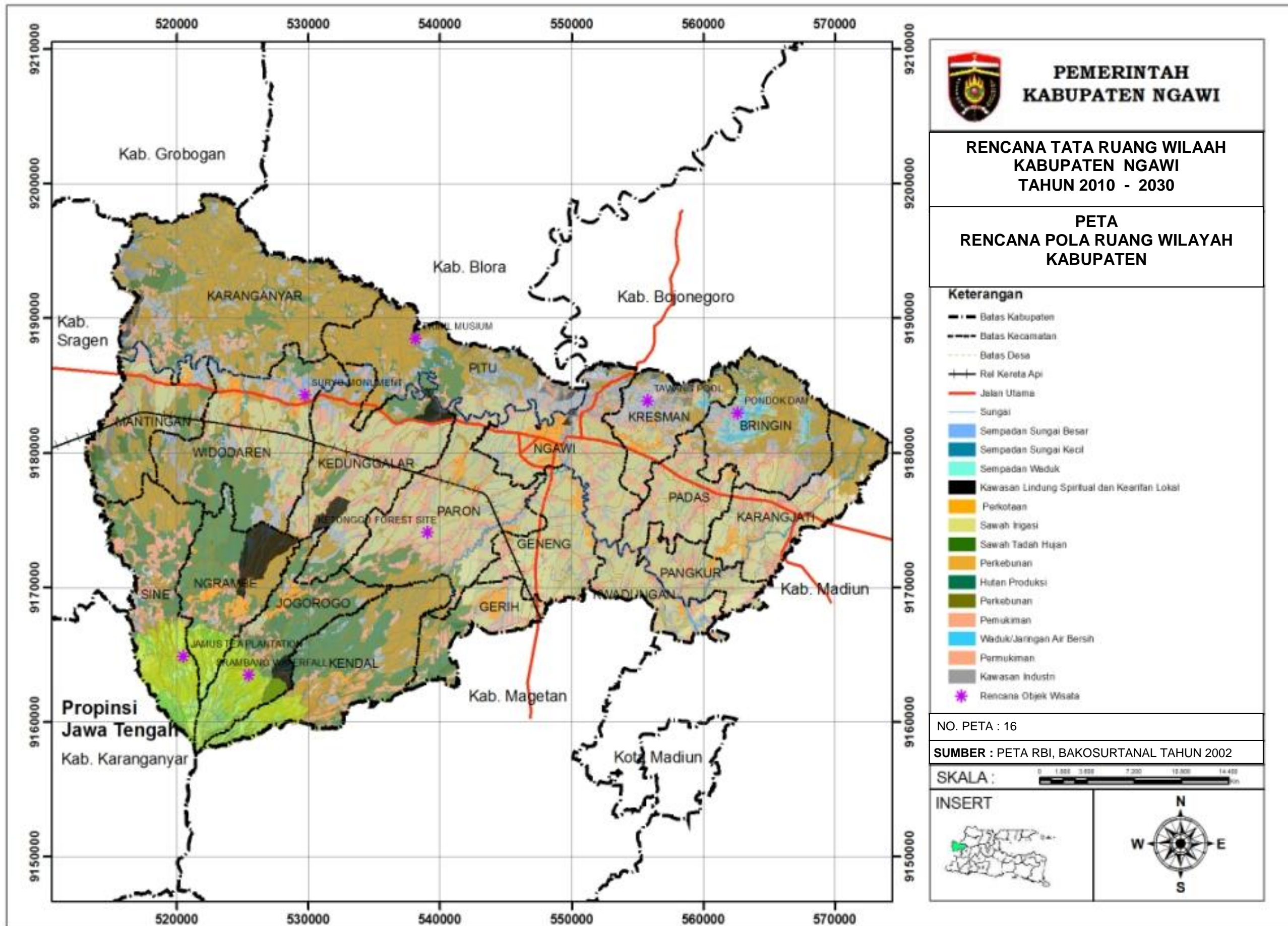

BADAN KESBANGPOL DIY
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 196010261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

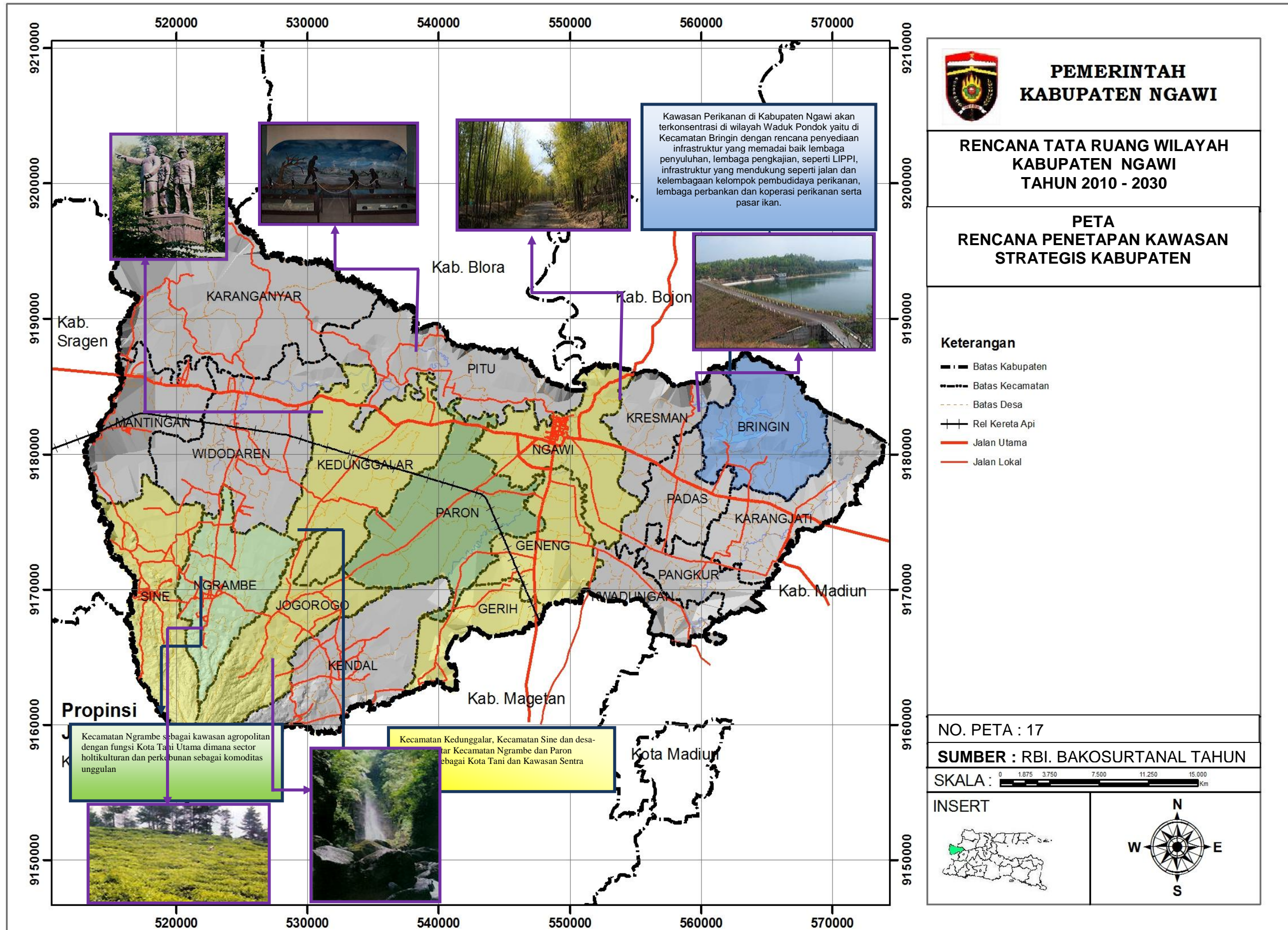
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



PETA RENCANA POLA RUANG



PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten										
1	Sistem Perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan	Pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan di Kecamatan Sine, Kendal, Ngrambe, Jogorogo dan Padas.(Kabupaten Ngawi bagian selatan)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat perkebunan dan pasar perkebunan di kecamatan Ngrambe 	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan.	√	√		
		Pengembangan kawasan Agropolitan	Mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Kecamatan Ngrambe	<ul style="list-style-type: none"> Promosi hasil produk pertanian Pengadaan infrastruktur penunjang, berbasis teknologi modern 	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan.			√	
2	Sistem Perkotaan	Pengembangan orde perkotaan	Pengembangan ibukota kabupaten sebagai PKL	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke arah pusat 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, dinas Bina Marga Provinsi, Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Ngawi.	√	√		
		Pengembangan perkotaan utama sebagai PKL, PKLp dan PKK	Pengembangan perkotaan Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan industri Pengembangan permukiman Pengembangan jalan kolektor Pembangunan jalan lingkar (ring road) 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen Perhubungan, Dishub Provinsi, Dis Hubpar Kabupaten , Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pu Ciptakarya.	√	√	√	√
		Hirarki (besaran) perkotaan	Kecamatan Ngawi sebagai PKL yang memberikan pelayanan kepada PKLp dengan fungsi kegiatan primer, dengan orientasi pelayanan regional	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana-prasarana penunjang perkotaan 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Departemen PU, Dishub dan Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PU Ciptakarya, Dinas PU Binamarga Kabupaten Ngawi			√	
		Sistem & fungsi perwilayahan	Mendorong pembentukan pusat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke arah pusat Pelayanan 	APBD Kab	Dinas Pu Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kabupaten			√	√
		Fasilitas perkotaan	Pengembangan perkotaan Kabupaten Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur kawasan 	APBD Kab	Dinas PU Binamarga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kabupaten				√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
		Prasarana wilayah	Mewujudkan jalan internal provinsi melalui pengembangan jalan tembus	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jalan dari kolektor menjadi arteri Peningkatan kualitas jalan 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas PU, Dishub dan Dinas Binamarga Provinsi, Dinas PU Binamarga, Dinas Perhubungan, dan BPN Kab.			√	√
B. Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perkotaan										
1	Penetapan Fungsi Kawasan Perdesaan	Pengembangan produk unggulan	Mendorong ekspor hasil pertanian unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sentra produksi-pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ngawi 	APBD Kab	Din. pertanian, perkebunan Propinsi, Din. pertanian & Kehutanan Kabupaten.			√	
		Pengembangan sistem agropolitan	Pengembangan produk unggulan, pengolahan dan perluasan jaringan di kec : Kecamatan Ngrambe sebagai Kota Tani Utama dan desa/kecamatan dikawasan sekitarnya sebagai penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pasar Pengembangan sub terminal agribisnis Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyediaan agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa). 	APBD Kab	Din. pertanian & Kehutanan, Dinas PU Ciptakarya, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan,	√	√	√	√
2	Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan	Pelayanan sosial ekonomi	Pengembangan perkotaan sebagai pusat pelayanan sosial – ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Ngawi sebagai ibukota kabupaten Ngrambe sbg kota kawasan Agropolitan 	APBN, APBD Provinsi, APBD Kab	Dinas PU, DKP, Dept Perhub, Pelindo, Perhutani, Kemtr Neg LH, Menpera, BPN, Dept Perindag, Bappenas, Dinas Binamarga Prov, DKP Prov, Din Perhub Prov, Dinas Permukiman Prov, BPN Provinsi, Dinas Perindag Prov, Bappeprov, Dinas PU Binamarga Kab, Din. Peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Perikanan & Kelautan Kab, Dinas perhubungan Kab, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab, Dinas Pu Ciptakarya Kab, BPN Kab, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab, Bappekab, Dinas Pertanian & Kehutanan Kab.			√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
		Pengembangan perkotaan IKK	Pemenuhan fasilitas perkotaan dan peningkatan interaksi kawasan	Penyediaan sarana penunjang	APBD Kab	Dinas PU Ciptakarya Kab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab, Dinas Perhubungan Kab.			√	√
C. Pengembangan Prasarana Wilayah										
1	Transportasi Jalan Raya	Pengembangan jalan	Pengembangan jalan penghubung dan jalan tembus/sirip antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Jalan tol Solo - Mantingan -Ngawi dan Ngaw- Kertosono Jalan kolektor menjadi arteri Jalan penghubung desa dan kota Jalan Lingkar (ring road) di Kecamatan Ngawi Peningkatan kualitas jalan 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dept PU, Dinas Binamarga Prov, Dinas PU Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Pu Ciptakarya, Dinas Perhubungan	√	√	√	√
		Pengembangan infrastruktur pendukung	Pengembangan terminal	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Terminal Kertonegoro type A Peningkatan pelayanan terminal Infrastruktur pendukung terminal 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas Binamarga Kab, BPN Kab, Bappekab, Dinas Pu Ciptakarya, Dinas Perhubungan.	√	√		
2	Transportasi Kereta Api	Transportasi massal	Pengembangan sistem transportasi massal & infrastruktur pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan <i>double track</i> Pengembangan jalur KA komuter 	BUMN	PT KAI, Dinas Perhubungan			√	√
3	Prasarana Telekomunikasi	Optimalisasi pelayanan	Pengembangan prasarana penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan tower BTS (<i>Base Transceiver Station</i>) secara bersama Pengadaan sistem internet, 3G dan GPS 	Swasta	Swasta	√	√	√	√
			Peningkatan jumlah dan mutu telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan seperti di Kecamatan Ngawi, Paron, Mantingan dan Karangjati. 	Swasta	Swasta		√	√	√
4	Prasarana Pengairan	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan waduk, bendung, cek dam, pengelolaan DAS Bengawan Solo dan Kali Madiun Penanaman pohon pencegah longsor 	APBD Kab	Dinas Pengairan	√	√	√	√

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN				
							I	II	III	IV	
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan perbaikan pintu air 							
5	Prasarana Energi/ Listrik	Optimalisasi pelayanan	Peningkatan kapasitas listrik	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan dan perbaikan jaringan Peningkatan infrastruktur pendukung Pengembangan sumber listrik (PLTA baru) 	BUMN	PLN			√	√	
6	Prasarana Lingkungan	Optimalisasi tingkat penanganan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan TPA regional Pengadaan TPS skala lokal (per sswp) 	APBD Prov, APBD - Kab,	Dinas Permukiman Prop, Dinas PU Ciptakarya.	√	√			
D. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten											
1	Kawasan Lindung	Pemantapan Kawasan Lindung	Pemantapan kawasan lindung bernilai strategis dalam penyediaan air	<ul style="list-style-type: none"> Pengembalian fungsi lindung dgn reboisasi Penanganan secara teknis Pengembangan hutan dan tanaman tegakan tinggi terutama pada kawasan kaki Gunung Lawu seperti Kendal, Jogorogo, Sine, Ngrambe, Mantingan dan Bringin. 	APBN, APBD Kab. Perhutani	UPT Kementerian Kehuanan, Perhutani, Bapeda, BPN Kab, Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√		
			Pemantapan kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional; 	APBN, APBD Kab. Perhutani	UPT Kementerian Kehuanan, Perhutani, Bapedda, BPN Kab, Dinas PU Pengairan Kab.	√	√	√		
				<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan DAS Bengawan Solo untuk air baku 	APBN, APBD Kab. Perhutani	UPT Kementerian Kehuanan, Perhutani, Bapedda, BPN Kab, Dinas PU Pengairan Kab.	√	√	√		
				<ul style="list-style-type: none"> Waduk dan mata air dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air; 	APBN, APBD Kab., Perhutani	UPT Kementerian Kehuanan, Perhutani, Bapedda, BPN Kab, Dinas PU Pengairan Kab.	√	√	√		
				<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sumber air dan waduk untuk irigasi 	APBN, APBD Kab., Perhutani	UPT Kementerian Kehuanan, Perhutani, Bapedda, BPN Kab, Dinas Pengairan.	√	√	√		

NO	RENCANA	KEBIJAKAN	KEBUTUHAN PENGEMBANGAN	PROGRAM UTAMA	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHAPAN			
							I	II	III	IV
			Pemantapan kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> Memelihara nilai dan fungsinya sebagai peninggalan sejarah, objek penelitian dan pariwisata Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan 	APBN, APBD Kab., Perhutani	UPT Kementrian Kehuanan, Perhutani, Bapedda, BPN Kab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	√	√	√	
2	Kawasan budaya	Pengembangan Kawasan Budidaya	Pengembangan hutan produksi bernilai ekonomi tinggi dengan fungsi lindung	<ul style="list-style-type: none"> Reboisasi tanaman untuk menahan tanah Pengembangan aneka produk olahan Mengembangkan hutan rakyat 	APBN, APBD Kab. Perhutani	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Bapedda, BPN Kab, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√	
			Pengembangan kawasan pertanian dan pengolahan dihasil produksi berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hortikultura untuk ekspor Pengembangan breeding centre Pengembangan Industri Perikanan di Kecamatan Ngawi dan Kecamatan Bringin. 	APBN, APBD Kab., swasta	Din. pertanian, perkebunan & Kahutanan, Dinas PU Pengairan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan dan Kelautan.	√	√	√	√
			Pengembangan kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan industri di kawasan potensial yaitu Mantingan industri pengeolahan kayu jati, Ngawi industri pengolahan kedelai. 	APBN, APBD Prv dan APBD Kab	Disperindag Prov, Dis Koperasi, Industri dan Perdagangan Kab			√	√
			Pengembangan kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan obyek wisata utama yaitu Wisata Pemandian Tawun, Waduk Pondok, Museum Trinil, Benteng Van Den Bosch, Air Terjun Srambang, Perkebunan Teh Jamus dan Monumen Suryo. Mengkaitkan kalender wisata nasional Pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya 	APBD Kab	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Perdagangan dan perindustrian Kab.				√